



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dan dapat dijadikan bahan acuan dalam mengevaluasi kinerja ditahun tahun mendatang)



LKJIP
Tahun 2017

KATA PENGANTAR



Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua jajaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali sangat membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta semua staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya dapat disusun LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017.

LKjIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi dari rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2017. Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali diharapkan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun serta mampu menyajikan data-data dan informasi yang semakin maksimal sehingga dapat menghasilkan LKjIP yang lebih baik sebagai wujud adanya peningkatan kinerja.

Denpasar, 26 Pebruari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Provinsi Bali,

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI.....	1
1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Issu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3 Realisasi Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Bali	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2017	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, dimana Dinas PUPR Provinsi Bali berperan dalam bidang Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur Jalan, sumber daya air, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sistem air limbah perpipaan terpusat, Pengelolaan Sampah, pengujian kualitas air dan bahan bangunan serta penyewaan alat berat.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah : “Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal untuk kehidupan yang produktif, berkelanjutan dan sejahtera berlandaskan konsep Tri Hita Karana menuju Bali Mandara”. Seiring dengan perubahan kondisi dan perubahan struktur perangkat daerah maka dilakukan review terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, namun perubahan yang terjadi menitikberatkan terhadap target yang hendak dicapai, hal ini disebabkan oleh Keterbatasan Anggaran yang diperoleh disetiap tahunnya tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan review tersebut.

Untuk mencapai target Renstra 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali telah menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdiri dari 6 sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mantapnya kondisi Infrastruktur
2. Meningkatnya pengendalian abrasi
3. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi
4. Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yang telah ditetapkan di awal tahun dan juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian indikator kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 91%, namun secara umum semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 403.214.682.432 bersumber dari dana APBD Provinsi Bali dapat direalisasikan sebesar Rp. 369.828.261.863,- atau sebesar 91,72% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,28 % yang terdiri dari sisa lelang serta adanya 2 (dua) buah paket pekerjaan yang tidak terselesaikan fisiknya mengingat berada di kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Agung.

BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali merupakan salah satu dari 46 Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas PUPR merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diterbitkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PUPR Provinsi Bali beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali periode tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2017, yang dilaksanakan oleh Bidang, UPT dan Sekretariat dilingkungan Dinas PUPR Provinsi Bali. LKjIP memiliki manfaat yang sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk

menunjukkan sejauh mana keberhasilan/capaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. ISSU STRATEGIS

Beberapa Issu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Kondisi dan kapasitas infrastruktur pekerjaan umum belum memenuhi standar kebutuhan;
2. Keterbatasan akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan ketenagalistrikan;
3. Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim;

4. Pemanfaatan ruang kawasan strategis belum sesuai dengan peruntukkan;
5. Rendahnya daya saing para pelaku jasa konstruksi.

Permasalahan yang dihadapi secara umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

1. Masih terdapat ruas jalan provinsi yang memiliki kondisi belum mantap sepanjang 122,05 Km atau sebesar 16,42 % dari ruas panjang jalan provinsi 743,34 Km
2. Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya SPAM Telagawaja dan Guyangan belum berjalan secara optimal yang diakibatkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat teknis maupun non teknis serta faktor topografi;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas PUPR;
2. Bidang Bina Konstruksi;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Bina Marga;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang;
7. UPT. Balai Peralatan dan Pengujian;
8. UPT. Pengelolaan Air Minum;
9. UPT. Pengelolaan Air Limbah;
10. UPT. Pengelolaan Sampah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat pada **Lampiran 1**

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mempunyai 18 (delapan belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing-masing Bidang, UPT, Sekretariat dan didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 416.580.392.032,00. Perjanjian Kinerja yang telah dirancang diawal tahun mengalami perubahan, karena di bulan Oktober 2017 terjadi Perubahan Anggaran menjadi Rp. 403.214.682.432,00. Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, mengalami pengurangan sebesar Rp. 13.365.709.600,00. yang diakibatkan oleh adanya rasionalisasi anggaran pada saat perubahan Anggaran Tahun 2017 (DPPA 2017) dampak dari adanya inflasi sebesar 1,07% di Provinsi Bali.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 terdiri dari 6 sasaran strategis yang ingin dicapai , yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1	
Mantapnya kondisi Infrastruktur	
Indikator Kinerja	Target
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	70%

Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	155.000 m3
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	83,50 %
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	65,00 %

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya pengendalian abrasi**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	56,36 %

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 4**Meningkatnya Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	87,00 %
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85,00 %
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 6**Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa konstruksi**

Indikator Kinerja	Target
Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	210 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali tahun 2017 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2017 dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Mantapnya kondisi Infrastruktur			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	70,00%	68,62%	97,14
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	155.000 m3	189.425 m3	122,21
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	83,50 %	83,58%	100,09

Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	65,00 %	63,50%	97,69
--	---------	--------	-------

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya pengendalian abrasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	56,36 %	57,60%	102,20

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00

SASARAN STRATEGIS 4**Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	87,00 %	88,00 %	101,15
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85,00 %	84,27 %	99,14
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %	73,25%	97,67

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	90,50 %	90,50
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %	60,00 %	60,00

SASARAN STRATEGIS 6**Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	230 orang	200 orang	86,96

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**Sasaran Strategis 1 : Mantapnya kondisi Infrastruktur**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);
2. Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3);
3. Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang);
4. Prosentase kehandalan bangunan gedung negara;

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	70,00%	68,62%	97,14%

Target yang ditetapkan adalah 70%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 68,62% dari target yang ditetapkan. Rasio Jaringan Irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, dimana Target sebesar 65% dan realisasi sebesar 65,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 68,62% sehingga target yang harus dicapai dalam 1 tahun kedepan sebesar 6,38%.

Untuk mencapai target tahun 2017 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Dwi Eka Buana di Kab. Bangli, Gianyar
2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kab. Buleleng (DAK)

Selain pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan Pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Yeh Leh di Kabupaten Jembrana;
2. Pemeliharaan Jalan Masuk Menuju Bendung dan Bangunan Bagi Utama BG.1, D.I. Gerana di Kabupaten Badung;
3. Pemeliharaan Tembok Pagar Kantor Pengamat Pengairan D.I. Palasari-Benel di Kabupaten Jembrana;
4. Pemeliharaan Kantor Pengamat D.I. Balian-Yeh Leh di Kabupaten Tabanan;
5. Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Pekerjaan Swakelola).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah secara umum penutupan air tidak ditepati oleh subak sesuai dengan yang telah disepakati dalam waktu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, karena petani sudah melakukan kegiatan tanam padi, disamping itu kondisi topografi saluran irigasi cukup ekstrim dan jarak angkut bahan yang cukup sulit. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi akan adanya pekerjaan rehab Jaringan Irigasi baik secara formal maupun tidak formal kepada petani/subak yang kena dampak pelaksanaan kegiatan.

✓ *Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	155.000 m3	189.425 m3	122,21

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 155.000 m3. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian penambahan kapasitas penyediaan air baku adalah 189.425m3 atau sebesar 122,21% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, dimana Target sebesar 150.000 m3 dan realisasi sebesar 189.425 m3 sehingga capaiannya sebesar 126,23%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 160.000m3 sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 189.425 m3 sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 29.425m3.

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan penambahan kapasitas penyediaan air baku pada tahun 2017 ini pendanaannya bertumpu pada APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari APBD dianggarkan untuk pemeliharaan saja terhadap 4 (embung) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah masalah pembebasan lahan/tanah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah perlu koordinasi yang lebih intensif dengan kab./kota dan masyarakat sekitarnya mengenai manfaat pembangunan embung/waduk terkait dengan penambahan penyediaan air baku.

✓ *Prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	83,50 %	83,58%	100,09

Target yang ditetapkan pada indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2017 adalah 83,50 %.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 402,03 km, kondisi sedang 219,24 km dan kondisi rusak sepanjang 122,07 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2016, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 373,85 km, kondisi sedang 241,05 km dan kondisi rusak sepanjang 128,44 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 83,58 % atau sebesar 100,09 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 86,89 % dan realisasi sebesar 82,72 % dan capaian sebesar 95,20 %, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, dan secara umum kondisi jalan provinsi semakin baik.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 85,54% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 83,58% sehingga target yang harus dicapai dalam 1 tahun kedepan sebesar 1,96%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 43,09 Km dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Buleleng - Kubutambahan 5.00 Km di Kabupaten Buleleng;
2. Peningkatan Jalan Provinsi Paksebal - Selat 4.15 Km di Kabupaten Karangasem;
3. Peningkatan Jalan Provinsi Pempatan - Ban 3.15 Km di Kabupaten Karangasem;

4. Peningkatan Jalan Provinsi Simp. Tista - Lempuyang 2.00 Km di Kabupaten Karangasem;
5. Peningkatan Jalan Provinsi Belayu - TMP. Margarana 6.17 Km di Kabupaten Tabanan;
6. Peningkatan Jalan Provinsi Kedewatan - Payangan - Baturanyar 3.50 Km di Kabupaten Gianyar;
7. Peningkatan Jalan Provinsi Wanagiri - Munduk - Mayong 4.00 Km di Kabupaten Buleleng;
8. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Kota Bangli - Nongan 4.00 Km di Kabupaten Bangli;
9. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Buruan - Senganan - Pacung 4,56 Km di Kabupaten Tabanan;
10. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Menanga - Sp. Pempatan 4,45 Km di Kabupaten Karangasem;
11. Peningkatan Jalan Provinsi Jalan Dalem Puri (Besakih) dan Jalan Provinsi Jalan Penataran Agung (Besakih) 2,11 Km di Kabupaten Karangasem.

Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 16,85 Km dari APBD Murni dan sepanjang 7,12 Km dari DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Trotoar Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 Kab/Kota;
2. Pemeliharaan Jembatan Tk. Teba (Dps) Pada Ruas Jalan Provinsi;
3. Pemeliharaan 116 Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi;
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Denpasar - Sp. Pesanggaran (Dps) sepanjang 1,90 km;
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Blahbatuh - Bone - Bts. Kota Gianyar Sepanjang 2,00 km
6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Bts. Kota Negara - Pengambengan dan Jalan Provinsi Jln. Danau Buyan - Bts. Kota Negara sepanjang 5,23 km;
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Pekutatansepanjang 3,00 km;
8. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Kerobokan - Munggu - Tanah Lot sepanjang 2,50 km;
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Husni Thamrin (Tabanan), Jalan Provinsi Jln. Wagimin Kediri (Tabanan) dan Jalan Provinsi Bts. Kediri - Tanah Lot Sepanjang 2,22 km;

10. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Seririt Sepanjang 2,03 km (DAK);
11. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Rendang - Bts. Kota Amlapura sepanjang 3,60 km (DAK);
12. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Danau Buyan - Bts. Kota Negara Sepanjang 1,49 km (DAK);

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan - Bts. Buleleng Km. 84+400
2. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 42+500
3. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 81+200
4. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 67+550
5. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Lateng - Madenan - Bondalem Km. 67+500
6. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 58+000 dan Km. 62+500
7. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Kayu Amben Km. 45+200
8. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 43+300
9. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan - Bts. Buleleng Km. 65+800
10. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan - Bts. Buleleng Km. 69+900
11. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 67+500
12. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 85+150
13. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Kedewatan - Payangan - Baturanyar Km. 35+050

14. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan
- Bts. Buleleng km. 63+300
15. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Pupuan -
Seririt Km. 74+250
16. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan
- Bts. Buleleng Km. 76+900
17. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Lateng
- Madenan - Bondalem Km. 88+050
18. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan
- Bts. Buleleng Km. 79+500
19. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Pakseballi
- Selat Km. 54+200, Km. 54+225, Km. 54+242, dan Km. 54+464
20. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang -
Kintamani Km. 66+300
21. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang -
Kintamani Km. 65+500
22. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan
- Bts. Buleleng Km. 78+200, Km. 79+450, Km. 82+600
23. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Seraya-
Culik (Jembatan Tukad Lean) Km. 114+400
24. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Pupuan -
Seririt Km. 80+800
25. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penelokan
- Bts. Buleleng Km. 76+300 dan Km. 84+800
26. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota
Bangli - Sp. Penelokan Km. 52+500
27. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Cupel -
Banyubiru Km. 105+250
28. Perkuat Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Cupel -
Banyubiru Km. 105+250

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah seringnya turun hujan mengakibatkan banyak ruas jalan yang rawan terjadi longsor, sehingga diperlukan penanganan berupa Perkuatan Tebing dan saluran yang lokasinya tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Bali. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan berkala

maupun peningkatan ruas-ruas jalan provinsi yang berdampak pada masih terdapatnya ruas-ruas jalan provinsi yang belum bisa tertangani secara maksimal. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2018 adalah melakukan pengawasan secara optimal dan memanfaatkan mandor-mandor jalan yang tersebar di seluruh kabupaten untuk lebih sigap dan cepat untuk menginformasikan apabila ada longsor pada ruas jalan provinsi, mengingat seringnya hujan yang terjadi dan berdampak pada kondisi ruas jalan yang ada pada daerah-daerah rawan longsor. Penambahan anggaran dan penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya akan membuat segala permasalahan yang ada dapat tertangani lebih cepat dan baik.

✓ *Prosentase kehandalan bangunan gedung negara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	65,00 %	63,50%	97,69

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 65,00 %. Jumlah bangunan gedung negara dan lingkungan di Provinsi Bali sebanyak 225 unit. Sampai tahun 2017 yang dalam kondisi baik sebanyak 142 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat Prosentase kehandalan bangunan gedung negara dan lingkungan adalah sebesar 63.50 % atau sebesar 97,69 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 55,00% dan realisasi sebesar 58,22 % sehingga capaiannya sebesar 105,85 %, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,61% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 63,50 % sehingga target yang harus dicapai dalam 1 tahun kedepan sebesar 12,11%.

Untuk mencapai target Tahun 2017 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sebagai berikut :

1. Penataan di Sekitar Monumen Bajra Sandhi
2. Rehabilitasi Gedung Kantor Pramuka di kota Denpasar
3. Penatan Pura Lempuyang Kec. Abang Kab. Karangasem
4. Penataan Pura Besakih Kec. Rendang Kab. Karangasem

5. Penataan Pura Teratai Bang Kec. Baturiti Kab. Tabanan
6. Pekerjaan Penyiapan Panggung Pembukaan Pesta Kesenian Bali
7. Penataan Pura Goa Lawah Kec. Dawan Kab. Kelungkung
8. Penataan Taman Pujaan Bangsa Margarana di Kab. Tabanan (Lanjutan)

Pelaksanaan tahun 2017 terdapat 2 paket pekerjaan yang mengalami putus kontrak karena kondisi *force majeure*, akibat dari erupsi Gunung Agung, yaitu Penataan Pura Lempuyang Kec. Abang Kab. Karangasem dan Penataan Pura Besakih Kec Rendang Kab. Karangasem, sedangkan paket pekerjaan yang lain dapat berjalan dengan baik. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah memprioritaskan program kegiatan yang mendukung target renstra tentang kehandalan bangunan gedung negara.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian abrasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)	56,36 %	57,60%	102,20

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 56,36 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi adalah sebesar 57,60% atau sebesar 102,20% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 55,26% dan realisasi sebesar 57,60% sehingga capaiannya sebesar 104,23%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 57,47% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 57,60% sehingga target sampai dengan tahun ini telah melebihi yaitu sebesar 0,13%.

Dapat disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pantai yang telah tertangani sampai dengan tahun 2017 sepanjang 104,891 km yang pendanaannya sebagian besar bersumber dari APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan yang bersumber dari APBD s/d tahun 2017 sepanjang 3,148 km. Untuk mencapai target yang ditetapkan Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan pengamanan pantai yaitu Pengamanan Pantai Julah di Kab. Buleleng sepanjang 240 M' atau sepanjang 0,240 Km

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah penggunaan akses/jalan masuk untuk mengangkut material milik desa adat sering dikomersilkan sehingga upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya adalah perlu peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan desa adat setempat disamping itu perlu penambahan *sharing* pendanaan dari APBD Provinsi Bali terkait penanganan pengamanan pantai, karena pantai di Bali dari segi ritual keagamaan sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu pelestarian nilai-nilai budaya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2017 melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Disain D.I Benel;
2. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Disain D.I Palesari;
3. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Disain D.I Gerana;
4. Pengawasan Pembangunan Pengamanan Pantai Julah dan Perbaikan Saluran Pembuang ke Danau Buyan di Kab. Buleleng;
5. Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar;
6. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kabupaten Buleleng (DAK).

Sasaran Strategis 3 : Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 100,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah sebesar 100,00% atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realiasai sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2017 sama dengan capaian tahun lalu.

Untuk mencapai target tahun 2017 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

1. Harmonisasi Review Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah :

- Kualitas dan Kuantitas SDM belum optimal
- Belum semua Rencana Rinci Tata Ruang Tersusun
- Prosedur dan Mekanisme Penyusunan Rencana Tata Ruang sangat panjang
- Belum semua pedoman NSPK Bidang Tata Ruang tersedia

- Banyak terjadi indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Bintel dan Rapat-rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Menyusun Rencana Rinci Tata Ruang secara bertahap
- Melakukan Koordinasi ke Kementerian ATR tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang

Sasaran Strategis 4 : Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali
2. Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali
3. Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	87,00 %	88,00 %	101,15

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 87,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali adalah sebesar 88,00 % atau sebesar 101,15 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 83,00 % dan realisasi sebesar 89,29 % sehingga capaiannya sebesar 107,58 %. Dengan demikian capaian tahun 2017 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 88,00% sehingga target yang harus dicapai dalam setahun kedepan sebesar 2,00 %. Untuk menunjang tercapainya target tahun 2017 tersebut melalui

APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan yaitu Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah terbatasnya jumlah *House Inlet* yang tersedia sehingga pemasangan sambungan pelanggan yang dapat dilayani juga terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah memprioritaskan pemasangan saluran tersier untuk memperbanyak *House Inlet* sehingga sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

House Inlet sehingga sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85,00 %	84,27 %	99,14

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 85,00 %. Jumlah penduduk provinsi bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum sebanyak 3.551.943 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 84,27 % atau sebesar 99,14 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 80,00% dan realisasi sebesar 76,56% sehingga capaiannya sebesar 95,70%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 84,27% sehingga target yang harus dicapai dalam setahun kedepan sebesar 5,73%.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2017 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan SPAM Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung
2. Pengembangan SPAM Desa Les Kab. Buleleng
3. Pengembangan SPAM Guyangan di Kec.Nusa Penida, Kab. Klungkung

✓ *Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %	73,25%	97,67

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 75,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah sebesar 73,25% atau sebesar 97,67% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 75,00% dan realisasi sebesar 68,75% sehingga capaiannya sebesar 91,67%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 80,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 73,25% sehingga target yang harus dicapai dalam setahun kedepan sebesar 6,75%.

Untuk mencapai target tahun 2017 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai berikut :

1. Pembuatan Drainase di Area Kolam Lindi TPA Regional Sarbagita
2. Pembuatan Drainase di Area Komposting TPA Regional Bangli

Selain itu juga untuk mencapai target yang ditetapkan juga dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional sebagai berikut :

1. Pembelian Material Tanah Penutup di TPA Regional Sarbagita
2. Pembelian Material Tanah Penutup di TPA Regional Bangli
3. Pemeliharaan TPA Regional Sarbagita
4. Pemeliharaan TPA Regional Bangli
5. Pengadaan Pompa Air Lindi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya (Reuse, Reduce, Recycle (3R)) masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah

menambah sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah dan koordinasi secara intensif untuk mendorong pemkab/pemkot melaksanakan sosialisasi tentang 3R (Reuse, Reduce, Recycle) guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat
2. Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah
3. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum
4. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 pada indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium pengujian dan alat berat sebanyak 280 responden. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium dan alat berat sebanyak 71 responden, Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2017 sama baiknya dengan capain tahun lalu.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2017 yaitu :

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan dilaksanakan pekerjaan Pengadaan alat-alat laboratorium
- Pada kegiatan Pelaksanaan Pelayanan alat berat dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Tandem Roller

Permasalahan yang dihadapi yaitu Laboratorium pada UPT. Balai Peralatan dan Pengujian belum ter-Akreditasi sehingga tidak memiliki daya saing dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang laboratorium kualitas air maupun dibidang tanah dan bahan bangunan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah Mengikuti Uji Profesi secara berkala yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian PU-PR, Menyiapkan langkah-langkah administrasi menuju proses Akreditasi (KAN) dan Penyiapan Sumber Daya Manusia dibidang Laboratorium ke PU-an bekerjasama dengan Kementerian PUPR.

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100%	100

Target yang ditetapkan tahun 2017 untuk indikator Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah 100,00% hal tersebut terkait dengan lancarnya aliran air limbah yang mengalir dari hilir ke hulu, keluhan masyarakat sebanyak kurang lebih 1000 keluhan namun telah berhasil ditangani dan mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2017 sama baiknya dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk tingkat kepuasan setiap tahunnya menggunakan target yang sama yaitu 100,00%, namun yg berbeda adalah jumlah responden yang digunakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan perlu semakin ditingkatkan karena sebagian besar permasalahan karena tersumbatnya jaringan perpipaan akibat sampah yang masuk ke dalam sistem sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Pemasangan grease trap perlu dibuatkan aturan dan dasar hukumnya mengingat lemak yang mengalir ke jaringan bisa mengeras dan menyumbat jaringan.
- c. IPLT yang saat ini dalam masa uji coba perlu penyempurnaan sistem sehingga memudahkan dalam operasional dan pemeliharaan.
- d. Kolam aerasi pasca berfungsinya IPLT perlu mendapat penanganan serius untuk mengembalikan fungsi dan kondisinya, demikian juga dengan kolam sedimentasi perlu pengurasan sehingga berfungsi dengan baik
- e. UPT PAL memerlukan fleksibilitas dalam menerapkan anggaran terutama di awal tahun dan akhir tahun karena keluhan masyarakat tidak bisa ditunda.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media audio visual.
- b. MOU dengan pelanggan dibuatkan klausul khusus pemasangan grease trap dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- c. Pengurasan kolam aerasi dan kolam sedimentasi dilakukan secara periodik sehingga kondisi mikroorganisme di kedua kolam tersebut sehat.
- d. Kondisi aerator yang berjumlah 21 tersebut harus terpantau dengan baik dan dalam kondisi yang fit. Perbaikan dan pemeliharaan aerator sangat diperlukan agar kondisi aerator mantap.
- e. Berkoordinasi dengan Satker PPLP Bali agar menyempurnakan sistem IPLT yang sudah terbangun.
- f. Menambah tenaga IPLT dan memberikan pelatihan sehingga tenaga di IPLT memiliki ketrampilan yang baik untuk mengoperasikan IPLT.
- g. UPT PAL yang menerapkan PPK BLUD merupakan solusi untuk mengatasi masalah anggaran karena memiliki fleksibilitas menerapkan anggaran.

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	90,50 %	90,50

Target yang ditetapkan untuk indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan pelayanan air minum sebanyak 5 responden yaitu PDAM Badung, Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Klungkung dan yang menyatakan puas sebanyak 5 responden, untuk tingkat capaian Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah sebesar 90,50 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100% dan realisasi sebesar 88,40% sehingga capaiannya sebesar 90,50 %, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2017 yaitu :

- Pemeliharaan Jaringan Air dan Jaringan Listrik SPAM
- Belanja Bahan Kimia untuk Operasional SPAM
- Belanja Asesoris Pipa sebagai Suku Cadang.
- Penyediaan Biaya Rekening Listrik untuk Operasional SPAM .
- Pengadaan Sarana untuk Operasional SPAM :
 - Pengadaan Storage Bahan Kimia
 - Pengadaan Masker Safet khusus untuk Gas Klor.
 - Pengadaan Alat-alat Uji Kualitas Air yaitu Klorin Meter.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pendistribusian air dari Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Petanu dari kapasitas maksimal 300 liter/detik saat ini baru mencapai 205 liter/detik.
- b. Pasokan air SPAM Penet dari Tukad Penet sering terganggu akibat sering bermasalahnya Bendung Karet pada Long Storage dan sedimentasi yang cukup tebal pada mulut intake Balai Wilayah Sungai Bali Penida SPAM Penet.
- c. Pengaliran air SPAM Telagawaja sering terganggu akibat sering bocornya Pipa Induk (Transmisi).

- d. Pada SPAM Telagawaja dan Guyangan belum semua masyarakat menjadi pelanggan PDAM, sehingga sebagian masyarakat masih menerima air secara gratis. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Membuat usulan kepada Kepala BWS-Bali Penida tentang penggantian Karet Pada Bendung Karet Tukad Penet serta pembuatan bronjong dekat mulut intake IPA Penet.
- Berkordinasi dengan BWS Bali Penida untuk mengkaji sistem perpipaan pada Jaringan Transmisi dan melakukan pemeliharaan/perbaikan sesegera mungkin jika terjadi kebocoran.
- Mendorong PDAM Karangasem dan PDAM Klungkung untuk mengembangkan Jaringan Sambungan Rumah (SR) pada wilayah-wilayah potensial.

✓ *Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	60,00 %	60,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 100,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebesar 60,00% dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat diperkirakan bahwa tingkat kepuasan konsumen dari berkurangnya complain dan antrean panjang truk-truk sampah pada zona pembuangan, yang disebabkan karena sudah ada jalan akses lingkar yang dibangun pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 50,00% sehingga capaiannya sebesar 50,00%, Dengan demikian capaian tahun 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mencapai target tahun 2017 telah dilaksanakan Revitalisasi TPA Regional khususnya di TPA Regional Sarbagita yang dimulai pada bulan Desember 2017 dengan bantuan dana APBN melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2017 adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah dan dibangunnya pengolahan sampah dengan *high* teknologi yang ramah lingkungan, salah satunya WTE (*Waste to Energy*).

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :
Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat

✓ *Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	230 orang	200 orang	86,96

Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah 210 orang, namun pada anggaran Perubahan target mengalami perubahan menjadi 230 orang. Dari tabel diatas dapat dilihat realisasinya sebesar 200 orang, sehingga capaian dari target yang ditetapkan sebesar 86,96%. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, dimana Target sebesar 75 orang dan realisasi 77 orang sehingga capaiannya sebesar 102,66%. Dengan demikian capaian pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Belum optimal dan tertibnya penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Tidak semua Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum di Pemkab/Pemkot se Bali memiliki unit kerja dan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi.
- Rendahnya jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat.
- Rendahnya pemahaman penggunaan dan pelaku jasa konstruksi terhadap peraturan atau NSPK yang mengatur jasa konstruksi.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih maksimal
- b. Untuk pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki unit kerja kewenangannya untuk sementara waktu diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Mendorong upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja jasa konstruksi dengan pendanaan pemerintah maupun swasta.
- d. Sosialisasi peraturan perundangan atau NSPK yang mengatur jasa konstruksi yang berkesinambungan.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2017 adalah sebesar Rp. 403.214.682.432,- (Empat ratus tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 1.820.860.000,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 79.226.683.646,00
 - Belanja Modal Rp. 322.167.138.786,00
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 369.828.261.863,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 91,72% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 1.623.658.000,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 71.515.622.713,00
 - Belanja Modal Rp. 296.689.031.150,00

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2017

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.577.200.000,00	2.280.278.918,00	88,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.998.146.752,00	3.716.300.410,00	92,95
3	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	167.600.000,00	137.227.950,00	81,88
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	167.344.676.000,00	167.228.482.192,00	99,93
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	117.498.581.600,00	114.268.060.671,00	97,25
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.737.217.208,00	10.565.668.876,00	82,95
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.614.867.000,00	3.371.130.985,00	93,26
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	37.706.294.208,00	16.400.314.218,00	43,49
9	Program Pengendalian Banjir/Abrasi	3.491.299.000,00	3.479.271.900,00	99,66
10	Program Perencanaan Tata Ruang	921.985.812,00	853.788.148,00	92,60
11	Program Penataan Bangunan	7.597.328.604,00	6.192.847.295,00	81,51
12	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	150.000.000,00	132.097.607,00	88,07
10	Program kehumasan Ke-PU-an	150.000.000,00	144.420.000,00	96,28
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	28.867.497.208,00	25.904.612.417,00	89,74
12	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	3.290.096.604,00	3.133.082.829,00	95,23
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.758.000.000,00	2.705.401.022,00	98,09
18	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	8.397.360.000,00	7.973.498.100,00	94,95
19	Program Pemanfaatan Ruang	314.657.208,00	205.765.398,00	65,39
20	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	367.732.208,00	335.626.270,00	91,27
21	Pembinaan Jasa Konstruksi	1.264.143.020,00	800.386.657,00	63,31
Total		403.214.682.432,00	369.828.261.863,00	91,72

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di tahun 2017 melaksanakan sebanyak 20 program yang terdiri dari 86 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp. 403.214.682.432,- dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 369.828.261.863,00 atau sebesar 91,72%

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing bidang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provnsi Bali 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	4.424.116.352,00	4.000.410.539,00	90,42
II.	Bidang Bina Konstruksi	1.264.143.020,00	800.386.657,00	63,31
III.	Bidang Sumber Daya Air	19.843.383.208,00	17.416.071.761,00	87,77
IV.	Bidang Bina Marga	293.240.617.600,00	289.470.040.963,00	98,71
V.	Bidang Cipta Karya	48.593.719.416,00	25.726.244.342,00	52,94
VI.	Bidang Tata Ruang	1.604.375.228,00	1.395.179.816,00	86,96
VII.	UPT. Balai Peralatan dan Pengujian	1.944.032.208,00	1.795.163.806,00	92,34
VIII.	UPT. Pengelolaan Air Minum	17.075.640.000,00	15.205.319.907,00	89,05
IX.	UPT. Pengelolaan Air Limbah	11.470.000.000,00	10.412.941.919,00	90,78
X.	UPT. Pengelolaan Sampah	3.754.655.400,00	3.606.502.153,00	96,05
	Jumlah total	403.214.682.432,00	369.828.261.863,00	91,72

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	17.764.238.400,00	26.302.650.277,12	148,07
	Total Pendapatan	17.764.238.400,00	26.302.650.277,12	148,07
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	31.093.333.530,00	27.994.881.757,00	90,03
	2. Belanja Langsung :	403.214.682.432,00	369.828.261.863,00	91,72
	a. Belanja Pegawai	1.820.860.000,00	1.623.658.000,00	89,17
	b. Belanja Barang dan Jasa	79.226.683.646,00	71.515.622.713,00	90,27
	c. Belanja Modal	322.167.138.786,00	296.689.031.150,00	92,09
	Total Belanja	434.308.015.962,00	397.823.143.620,00	91,60
	Surplus/Defisit	416.543.777.562,00	371.520.543.342,88	89,19

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali per 31 Desember 2017 adalah sebesar 17.764.238.400,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sebesar Rp. 14.777.470.400,00 pendapatan tahun 2017 lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

- Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 31.093.333.530,00 dimana realisasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 27.994.881.757,00 atau sebesar 90,03% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi tahun 2017 lebih rendah, dimana realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 36.700.637.010,00 atau sebesar 87,96%.

- Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2017 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 403.214.682.432,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 369.828.261.863,00 atau sebesar 91,72% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi tahun 2017 sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2016 dimana realisasinya sebesar Rp. 577.911.991.469,58 atau sebesar 98,16%.

Sisa anggaran yang tidak terserap dari rencana dikarenakan adanya efisiensi berupa dana sisa lelang dari paket pekerjaan yang dikontrakkan dan terdapat sisa anggaran dari paket pekerjaan akibat adanya putus kontrak karena kondisi *force majeure* akibat bencana erupsi gunung agung.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali tahun 2017 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2017 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

Capaian indikator kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 91%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2014-2018. Realisasi Anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp. 403.214.682.432,00 dan terealisasi sebesar Rp. 369.828.311.863,00 atau sebesar 91,72% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,28 %.

LKjIP tahun 2017 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat

maupun dengan apraiser agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sector, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
3. Penyusunan OE (Owner Estimate) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/ kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN I

Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Bali

STRUKTUR ORGANISASI

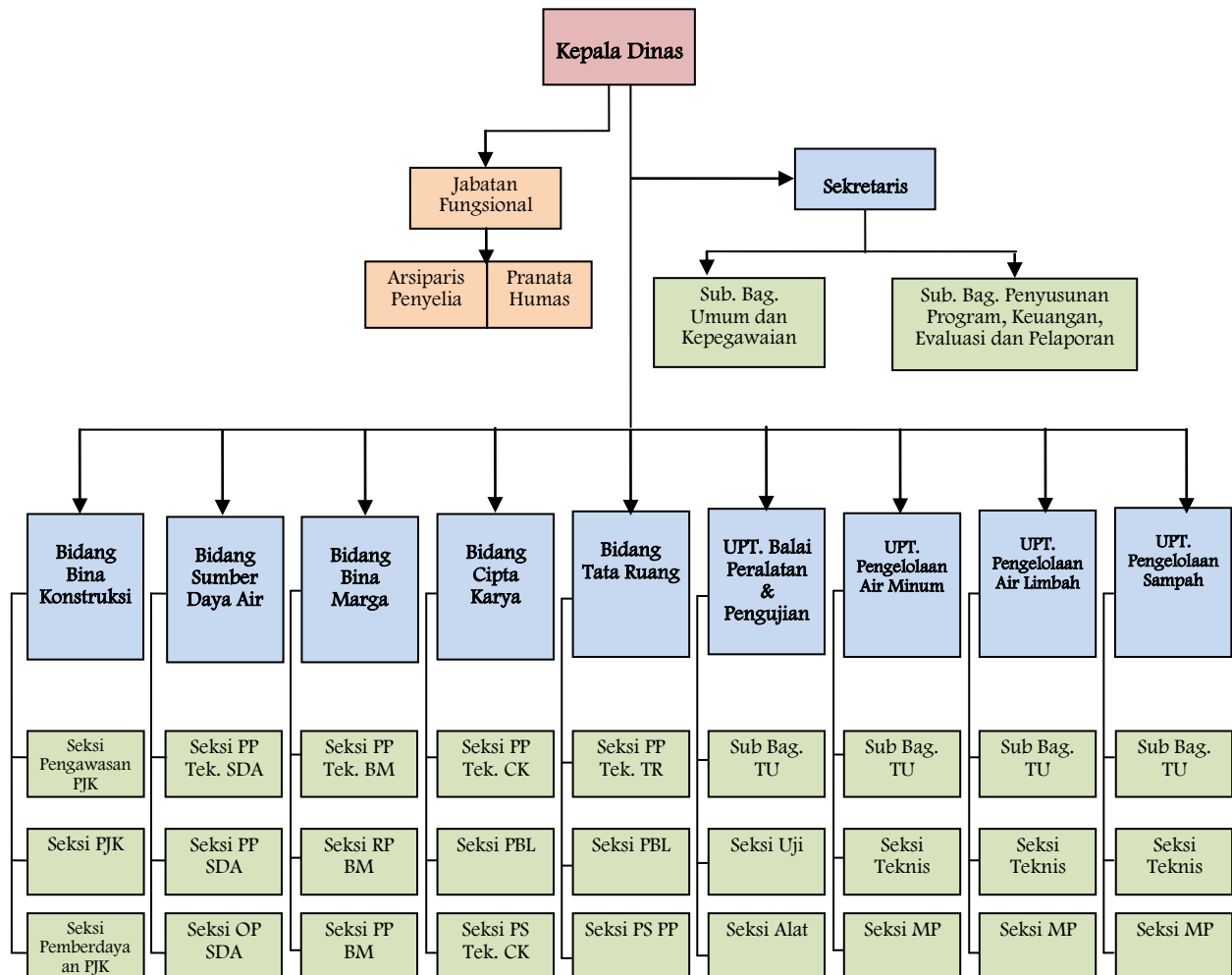


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2017

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Provinsi Bali

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. I NYOMAN ASTAWA RIADI, MSI

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE MANGKU PASTIKA

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI



MADE MANGKU PASTIKA

Denpasar, 4 Januari 2017

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BALI



IR. I NYOMAN ASTAWA RIADI, MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mantapnya kondisi Infrastruktur	1 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	70,00%
		2 Jumlah kapasitas penyediaan air baku	155.000 m3
		3 Prosentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	83,50%
		4 Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	65,00%
2	Meningkatnya pengendalian abrasi	5 Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	56,36%
3	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi	6 Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%
4	Meningkatnya ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.	7 Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	87,00%
		8 Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	85,00%
		9 Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10 Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00%
		11 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00%
		12 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00%
		13 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%
6	Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi	14 Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat	210 Orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp 14.548.700.000,00	APBD/DAK
2	Program pengembangan, pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air Lainnya	Rp 1.908.000.000,00	APBD/DAK
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 122.045.222.000,00	APBD/DAK
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 178.810.390.300,00	APBD/DAK
5	Program Penataan Bangunan	Rp 7.590.000.000,00	APBD
6	Program Pengendalian Banjir/Abrasi	Rp 5.061.800.000,00	APBD
7	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 850.000.000,00	APBD
8	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp 38.500.000.000,00	APBD
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.758.000.000,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 24.381.200.000,00	APBD
11	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	Rp 3.082.250.000,00	APBD
12	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 300.000.000,00	APBD
13	Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp 1.250.000.000,00	APBD

Jumlah Anggaran : Rp 416.580.392.032,00

Denpasar, 4 Januari 2017

Gubernur Bali,



MADE MANGKU PASTIKA

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Bali



Ir. I NYOMAN ASTAWA RIADI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600916 198012 1 002



LKJIP
Tahun 2017